

Executive Summary
PENELITIAN DOSEN PEMULA



PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) :
Analisis Kekerasan dan Strategi Pencegahan

Oleh:
Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, MA
NIDN. 0010087712

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
Desember 2013

**PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) :
Analisis Kekerasan dan Strategi Pencegahan**

Peneliti : Linda Dwi Eriyanti¹
Mahasiswa yang terlibat : Totok Handoko²
Sumberdana : DIPA BOPTN
Kontak Email : elindadwi@yahoo.com

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan pekerja rumah tangga; mendiskripsikan strategi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan telaah dokumen terkait tujuan penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja di wilayah Kabupaten Jember khususnya di kelurahan Sumbersari dan Kelurahan Tegalgede, yang kesemuanya berada di kecamatan Sumbersari. Informan dan responden adalah pekerja rumah tangga, majikan, penyalur tenaga pekerja rumah tangga, tokoh masyarakat, aparat desa dan dinas pemerintah terkait. Dari penelitian ini diketahui bahwa PRT mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan langsung yang dialami PRT mulai dari upah rendah, jam kerja berlebih sampai kepada kekerasan psikologis yang berasal dari majikan. Sedangkan kekerasan struktural dan kekerasan kultural bersumber dari struktur yang diskriminatif terhadap perempuan yang dilegitimasi oleh budaya patriarki. Strategi pencegahan kekerasan mengarah kepada upaya yang seharusnya dilakukan oleh negara maupun masyarakat, termasuk elemen-elemennya, yakni akademisi, LSM.

Kata kunci; *pekerja rumah tangga, kekerasan, strategi pencegahan kekerasan, diskriminasi, marginalisasi*

¹ Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

² Jurusan Manajemen FE Universitas Jember

Abstract

This study aimed to identify and describe the forms of violence that occur in women domestic workers and describe strategies to prevent and address cases of violence for domestic workers. This study used a qualitative descriptive approach. Collecting data through observation, interviews and document review related to the research objectives. Location research deliberately determined in Jember, especially in Summersari and Tegalgede Village, which are located in the district Summersari. Informants and respondents are domestic workers, employers, recruitment of domestic workers, community leaders, village officials and relevant government agencies . From this research it is known that domestic workers experienced various forms of violence. Direct violence experienced by domestic worker in low wages, excessive working hours up to psychological abuse from employers. In the other hand, structural violence and cultural violence comes from structures that discriminate against women are legitimized by patriarchal culture. Violence prevention strategies that should lead to efforts made by the state and society, including the elements, such academics and NGOs .

Keywords : *domestic worker, violence, violence prevention strategies, exploitation, marginalization*

Latar Belakang

Pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Perempuan yang selama ini diidentikkan dengan sifat-sifat feminine, seperti telaten, lemah lembut, emosional, dianggap cocok dengan pekerjaan rumah tangga. Ditambah lagi dengan perempuan yang secara kodrati mampu menjalankan fungsi reproduksi, yakni hamil dan melahirkan, dianggap memiliki kedekatan emosional yang lebih dengan anak-anak sehingga kemudian yang harus mengasuh dan mendidik anak dalam keluarga juga perempuan.

Seiring dengan perkembangan kapitalisme, pekerjaan domestik, atau yang seringkali disebut pekerjaan reproduktif dinilai lebih rendah daripada pekerjaan-pekerjaan produktif. Hal ini mendorong banyak perempuan untuk keluar dari wilayah *domestic* dan mencari pendapatan di ruang *publik*. Ironisnya adalah ketika perempuan ibu rumah tangga itu memilih bekerja di ruang publik, tetap dibutuhkan tenaga yang harus menangani pekerjaan dalam rumah tangga, yang selama ini dianggap tanggungjawab ibu rumah tangga. Dan yang menggantikan tetaplah dipilih kebanyakan perempuan, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumah tangga.

Menurut perkiraan ILO (Internasional Labour Organization), pembantu rumah tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global. ILO memperkirakan jumlah pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia saat ini mencapai 2,5 juta orang lebih, 1,4 juta di antaranya bekerja di Pulau Jawa. DKI Jakarta dengan jumlah terbesar: 801.566; kemudian Jawa Timur: 402.762; Jawa Tengah: 399.159; Jawa Barat: 276.939; Banten: 100.352 (Antara News, 26 /3/2012). Sementara itu, Komnas Perempuan memperkirakan jumlahnya sekitar 4 juta (<http://utama.seruu.com>). Dari jumlah tersebut, 90 persen pekerja rumah tangga adalah perempuan (Irawaty, 2005), dengan latar belakang pendidikan dan status ekonomi rendah. Meskipun di Indonesia belum diketahui jumlahnya secara pasti. tetapi yang jelas kelompok PRT ini kesejahteraannya belum diperhatikan dan dilindungi.

Stereotip terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan rendahan yang bisa dilakukan tanpa membutuhkan pendidikan, ketrampilan khusus, dan bisa dilakukan semua orang, sehingga secara komersialpun dihargai rendah. Pekerja

rumah tangga juga dengan image ‘pelayan’ dan pelayan harus tunduk pada majikan. Juga belum adanya perangkat ataupun aturan yang spesifik melindungi pekerja rumah tangga di Indonesia. Sehingga pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja, diantaranya, gaji yang tidak layak, hak mendapat pelayanan kesehatan, hak mendapat hiburan, hak untuk istirahat (Komalasari dan Jahidin, 2007).

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan mendiskripsikan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan pekerja rumah tangga di Jember
2. Mendiskripsikan strategi pencegahan kekerasan bagi pekerja rumahtangga di Jember

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan konsen terhadap masalah-masalah kekerasan. Juga bagi aktifis LSM maupun ormas peduli dengan masalah-masalah dan isu gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Jember. Daerah penelitian ditentukan dengan sengaja di Perumahan Taman Kampus, Perumahan Mastrip, Perumahan Bukit Permai, Perumahan Gunung Batu Permai dan Perumahan Semeru, yang berada di wilayah kelurahan kelurahan Sumbersari dan kelurahan Tegalgede.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer yakni data yang diperoleh langsung dari observasi dilokasi penelitian dan hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil laporan tertulis instansi terkait, literatur, karya-karya tulis serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini informan adalah majikan, tokoh masyarakat, LSM/Ormas Perempuan dan aparat kelurahan. Sedangkan responden adalah 21 orang pembantu rumahtangga di lokasi penelitian yang diambil secara snowball sampling. Analisis data melalui proses *Data reduction, Data Displays, Conclusion Drawing /Verification*. Reduksi data dilakukan semenjak pengumpulan data dengan penyederhanaan klasifikasi data kasar di lapangan. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan

data dan menelusuri tema yang tersebar. Penyajian data (*data displays*) merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, interpolasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif.

Hasil Dan Pembahasan

Kelurahan tegalgede berbatasan dengan Kelurahan Antirogo di sebelah utara, Kelurahan Summersari di sebelah selatan, Kelurahan Karangrejo disebelah Timur, dan Kelurahan Patrang di sebelah barat. Kelurahan Tegalgede hanya berjarak 3,5 dari ibukota kecamatan. Kelurahan ini terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT).

Luas wilayah Kelurahan Tegalgede adalah 269 ha yang terbagi menjadi wilayah pemukiman 66 ha, luas persawahan 118 ha, yang dimiliki oleh 802 Kepala keluarga. Luas perkantoran di kelurahan ini mencapai 3 ha, luas tanah pekarangan 53 ha, taman 1 ha, tanah kuburan 2 ha, dan prasarana umum lainnya seluas 26 ha. Total jumlah penduduk di Kelurahan Tegalgede pada tahun 2012 adalah 9580 orang dengan jumlah laki-laki 4692 dan jumlah perempuan 4888. Dari jumlah tersebut terdapat Kepala Keluarga 2780 dan tingkat kepadatan penduduk di kelurahan ini mencapai 658/km.

Kelurahan Summersari berbatasan dengan kelurahan Tegalgede di sebelah utara, Kelurahan kebonsari di sebelah selatan, kelurahan Karangrejo di sebelah timur, dan kelurahan Jember Lor di sebelah barat. Luas Pemukiman di Kelurahan Summersari mencapai 250,7ha, dan karena posisinya berada di ibukota kecamatan, kawasan ini merupakan area perkantoran dan pertokoan/bisnis. Jumlah Penduduk di kelurahan Summersari mencapai 24.346 yang terdiri dari penduduk laki-laki 11.720 dan jumlah penduduk perempuan 12662.

Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Summersari adalah 6798 yang terbagi dalam 133 wilayah Rukun Tetangga (RT). Tidak ada keluarga dalam kategori miskin atau sangat miskin di kelurahan ini. Terdapat 784 KK Keluarga Pra Sejahtera. Jumlah kepala keluarga yang termasuk kategori Keluarga Sejahtera tahap II adalah 1343. Sedangkan 1287 KK termasuk Keluarga Sejahtera Tahap III. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus di kelurahan ini mencapai 1511 KK.

Kondisi Perempuan Pekerja Rumahtangga

Latar belakang pendidikan yang dimiliki PRT hanya SD, SD tidak tamat, bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali dan tidak bisa membaca ataupun menulis. Mereka juga tidak memiliki ketrampilan khusus, sehingga pekerjaan sebagai PRT adalah satu-satunya pilihan bagi mereka untuk menambah penghasilan keluarga. Biaya pendidikan yang mahal dan tidak adanya keyakinan bahwa sekolah akan mampu membuat kehidupan menjadi lebih baik, membuat para orang tua tidak menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu, selama dalam keluarga masih ada anak laki-laki, maka anak laki-lakilah yang diberi kesempatan pertama untuk melanjutkan sekolah.

Gaji yang diterima oleh para PRT ini beragam, berkisar antara 150 hingga 650 ribu rupiah perbulan. Penetapan gaji yang diterima oleh PRT tidak ada patokan tertentu, hanya tergantung sepenuhnya terhadap majikan. Yang jelas gaji yang diterima PRT tidak pernah lebih besar ataupun sama dengan UMP yang ditetapkan di kabupaten Jember yakni Rp 1.091.950, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang upah minimum Kabupaten / Kota di Jatim 2013. Bahkan ada beberapa majikan yang memotong gaji PRT dengan alasan pekerjaan yang tidak beres, sering ijin tidak masuk, atau menghilangkan barang-barang. Tidak jarang pula, karena kebutuhan sehari-hari, PRT meminjam uang dari majikan, sehingga gajinya perbulannya dipotong untuk mencicil pinjaman.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PRT adalah pekerjaan reproduktif, seputar pekerjaan sektor domestik. PRT dengan jenis pekerjaan tertentu, seperti hanya menyetrika, mencuci baju, dan membersihkan rumah bisa pulang kerumahnya lebih cepat. Tetapi dia juga mendapatkan upah yang lebih rendah, jika dibandingkan dengan PRT yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Demikian pula jika dalam satu rumah, majikan mempekerjakan lebih dari 1 orang pembantu, maka upahnya juga lebih rendah.

Masih kentalnya budaya gotong-royong diantara warga yang hidup di perkampungan, apabila ada tetangga atau saudara yang punya hajat atau ada yang meninggal, PRT biasanya juga mengajukan cuti. Dalam hal ini ada majikan yang memberikan toleransi dan memberikan cuti, tetapi ada juga yang tidak memberikan cuti dengan alasan tidak ada yang mengasuh anaknya saat ditinggal bekerja. Selain itu, cuti biasanya juga didapat hanya saat hari besar seperti libur hari raya. Bahkan

para majikan yang tinggal di perumahan biasanya mudik ke tempat asal cukup lama. Saat ditinggal mudik itulah PRT punya kesempatan libur dengan tetap digaji.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Pekerja Rumah Tangga

a. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung yang dialami oleh perempuan PRT yang tidak mnginap berupa tidak terpenuhinya hak-hak dasar sebagai pekerja rumah tangga. Mereka tidak mendapatkan penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, seperti kebebasan berserikat. Tidak ada organisasi, ataupun komunitas diantara PRT yang menjadi wadah mereka untuk berekspresi dan menyalurkan aspirasi, serta kepentingan-kepentingannya.

Beberapa diantara perempuan PRT, ada yang masih anak-anak berusia dibawah 17 tahun. Dengan bekerja sebagai PRT, anak-anak perempuan tersebut tidak lagi berkesempatan untuk bisa meneruskan sekolah ataupun mengikuti kursus-kursus maupun pelatihan yang lain.

PRT tidak pernah memiliki kontrak kerja tertulis dengan majikan. PRT seringkali tidak diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang mudah dipahami. Pemberian upah yang rendah, jauh dibawah UMK juga merupakan bentuk kekerasan. Beberapa majikan bahkan mengupah PRT yang baru bekerja dengan sangat rendah, dengan alasan PRT tersebut masih dalam masa percobaan dan belum diketahui kinerjanya.

Kekerasan fisik berupa pemukulan, tamparan, penyiksaan, ataupun kekerasan seksual tidak ditemukan pada PRT paruh waktu. PRT yang dianggap melakukan kesalahan oleh majikan, akan mendapatkan teguran dari majikan, berupa omelan ataupun makian yang membuat mereka tertekan secara psikologis.

Pemutusan hubungan kerja, atau pemecatan juga seringkali dilakukan secara sepihak oleh majikan. Ketika majikan merasa tidak memerlukan lagi bantuan dari PRT, ataupun menganggap PRT tidak rajin, tidak telaten dalam melakukan pekerjaannya, dan tidak bisa mengikuti keinginan majikan, maka sewaktu-waktu PRT tersebut bisa diberhentikan.

b. Kekerasan Struktural

PRT ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam struktur ekonomi masyarakat yang mengakibatkan PRT mengalami eksploitasi, beban ganda,

kesengsaraan, penyangkalan kebutuhan dasar dan marjinalisasi. Stratifikasi yang ada di masyarakat patriarkhis telah menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Dalam kehidupan sehari-hari, di ruang domestik maupun diruang publik, perempuan seringkali mengalami ketidakadilan. Perempuan termarginalisasi secara ekonomi, yang membuat mereka kesulitan mengakses sumber-sumber ekonomi, seperti kredit dan pasar. Perempuan juga dianggap sebagai makhluk yang lemah, emosional, tidak menyukai tantangan, sehingga layak dan cocok untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga. Dalam kehidupannya perempuan seringkali tidak diberi hak untuk mengambil keputusan penting, bahkan yang menyangkut kepentingan pribadinya. Hal ini terjadi di lingkup masyarakat, bahkan dalam keluarga. Perempuan yang berposisi sebagai anak subordinan terhadap orang tuanya, terutama ayah. Sedangkan perempuan yang berstatus sebagai istri, memiliki posisi yang lebih rendah dihadapan suaminya.

Didalam masyarakat. perempuan PRT juga menempati stratifikasi sosial yang rendah. Masyarakat cenderung bersikap tidak peduli terhadap keberadaan PRT. Demikian juga dengan negara yang seharusnya melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Jenis pekerjaan informal yang dilakukan di lingkup domestik tidak pernah dianggap sebagai kerja produktif yang layak diberi penghargaan seperti jenis-jenis pekerjaan di sektor formal.

Hal-hal diatas juga berakibat terhadap upaya pengembangan diri PRT. Ketika mereka merasa bahwa apa yang dilakukan hanyalah menuruti instruksi majikan, mereka merasa tidak perlu untuk mengembangkan dirinya. Bahkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain, yang dianggap tidak selevel dengan mereka, membuat tidak nyaman. Akhirnya PRT terasing dari lingkungan sekitarnya, yang membuat mereka juga terhambat aksesnya untuk mengaktualisasikan dirinya di masyarakat.

c. Kekerasan Kultural

Budaya Patriarkhi, yang dilegitimasi oleh agama dan keyakinan masyarakat menganggap pekerjaan rumah tangga bukanlah pekerjaan produktif, yang secara kodrati adalah tugas perempuan dan hanya cocok dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu keluarga-keluarga yang membutuhkan PRT memilih perempuan untuk dipekerjakan.

Masyarakat dan para majikan menganggap pekerjaan yang dilakukan PRT tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi, dan kemampuan khusus, sehingga wajar jika digaji dengan upah rendah. Hal ini membawa dampak meski PRT memiliki peran penting dalam perjalanan kehidupan keluarga, namun PRT tidak mendapatkan penghargaan yang setara dengan jasa dan layanan yang diberikan kepada majikan.

PRT identik dengan pekerjaan rendahan, dimana posisi PRT subordinat dihadapan majikan. Dalam masyarakat kapitalis yang sangat menghargai penguasaan atas materi, majikan yang membayar PRT secara otomatis memiliki kedudukan lebih tinggi dari PRT. Tidak seperti pekerjaan di sektor formal dan informal yang lain, PRT dianggap sebagai pembantu, bahkan babu yang dalam pandangan masyarakat merupakan pekerjaan kelas rendah.

Masyarakat juga akan memaklumi jika PRT yang dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya, malas, sering melakukan kesalahan, sering terlambat, diberikan sangsi-sangsi tertentu oleh majikan. Meskipun dalam beberapa hal, banyak juga majikan yang tidak menjamin hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh PRT.

Strategi Pencegahan kekerasan terhadap PRT

Perlu adanya perubahan cara berfikir untuk tidak melihat perempuan PRT sebagai warga kelas dua di masyarakat yang memiliki akses dan peluang yang sama untuk menikmati perdamaian dengan tidak mengalami kekerasan.

a. Pencegahan yang dilakukan oleh Negara

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah :

1. Harus membuat aturan/perundang-undangan tentang PRT, yang melindungi PRT dari berbagai bentuk kekerasan
2. Menyediakan aparat/lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan Aturan tersebut, juga menangani kasus-kasus kekerasan yang telah terjadi.
3. Mensosialisasikannya aturan/perundang-undangan secara intensif melalui berbagai media kepada seluruh masyarakat.
4. Adanya Prosedur baku untuk menanggapi setiap aduan dari PRT, yang disediakan secara memadai dan memungkinkan untuk bisa diakses oleh PRT.

5. Penting untuk dibuat kerjasama lintas sektoral, termasuk dengan LSM/Ormas yang menangani permasalahan kekerasan PRT, sehingga pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap PRT tersebut lebih komprehensif
6. Pemerintah memfasilitasi penelitian-penelitian terkait permasalahan dan kebutuhan PRT yang bisa dijadikan acuan untuk pembuatan kebijakan dan program pemberdayaan PRT.
7. Pemerintah seharusnya menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi PRT usia produktif untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan PRT
8. Menjadikan PRT sebagai suatu profesi sehingga ada penghargaan dan tidak ada lagi image buruk/ rendah dari masyarakat/majikan terkait dengan pekerjaan PRT.

b. Pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat

Masyarakat termasuk elemen-elemen didalamnya, Ormas, LSM, Akademisi, harus lebih peduli terhadap fenomena kekerasan PRT. Elemen-elemen masyarakat harus menyediakan ruang bagi PRT untuk bisa berekspresi dan mengaktualisasikan kepentingannya. Masyarakat dalam hal ini bisa melakukan hal-hal berikut:

1. Melalui komunitas, membangun kepedulian dan kepekaan untuk tanggap dan membantu mencegah terjadinya kekerasan terhadap PRT, baik ditingkat RT, RW, Desa, Kelurahan, maupun organisasi seperti PKK, dasa wisma, dan lain-lain dalam
2. Masyarakat seharusnya mampu menjadi system yang mendukung terbentuknya Serikat PRT yang akan membantu PRT dalam mengaktualisasikan kepentingannya, dan menjadikan PRT memiliki posisi tawar dihadapan majikan ataupun dalam system masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Kekerasan langsung yang dialami oleh PRT berupa : gaji yang rendah dengan jenis pekerjaan yang cukup berat, tidak ada cuti hamil dan melahirkan, tidak ada kontrak kerja, dan sangsi-sangsi berupa pemotongan gaji, jeratan hutang, teguran, maupun makian dari Majikan. Kekerasan struktural berupa tidak adanya

perlindungan hukum terhadap PRT yang membuat PRT tereksplorasi oleh sistem kapitalis yang timpang dan merugikan masyarakat miskin, terutama perempuan PRT. Hal itu masih ditambah lagi dengan kekerasan kultural, dimana masyarakat setempat menganggap wajar kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang menimpa PRT.

Daftar Pustaka

- Diah Irawaty, 2005, Yang Khas Dari Masalah PRT Perempuan dan Pendampingannya, Jurnal Perempuan No 39, 2005, hal : 23
- Kokom Komalasari dan Didin Jahidin, 2007, Perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga (studi kasus pada Yayasan Sosial Purnakarya Kota Bandung), UPI, Bandung, <http://penelitian.lppm.upi.edu>, diakses pada 29 Agustus 2013
- <http://utama.seruu.com/read/2011/03/03/42614/komnas-perempuan-desak-dpr-selesaikan-uu-prt#sthash.X0YIzVvQ.dpuf>, diakses pada 27 Agustus 2013.
- Konvensi-konvensi ILO tentang Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Kantor ILO Jakarta, 2006, www.ilo.org, diakses pada 30 September 2013